

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya terhadap Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Aset tetap merupakan suatu aset berwujud yang memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, digunakan untuk menjalankan kegiatan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual Kembali. Aset tetap yang dimiliki oleh suatu Perusahaan dapat berupa Gedung, peralatan, perlengkapan, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Aset tetap ini yang nantinya akan membantu memperlancar operasional Perusahaan. Semua bentuk Aset tetap dikenai penyusutan kecuali tanah atau lahan. Nilai aset tetap akan berkurang sering dengan realisasi masa umur manfaatnya.

Secara umum instansi pemerintahan dalam menentukan penyusutan biasanya menggunakan metode garis lurus dan di Dinas Kelautan dan Perikanan ini menggunakan metode penyusutan garis lurus. Beban penyusutan yang dihasilkan dengan menggunakan metode garis lurus setiap tahunnya akan sama apabila instansi menggunakan aset tetap yang relative sama setiap tahunnya. Dengan menggunakan metode ini maka beban penyusutan yang dialokasikan akan sama setiap tahunnya.

Ada beberapa masalah yang dihadapi dinas kelautan dan perikanan provinsi Sumatra Barat adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Koneksi jaringan SIPKD sering bermasalah

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran untuk menjadi perhatian demi perbaikan pengelolaan aset tetap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan percepatan pembenahan administrasi aset haruslah tersedia pegawai yang berkompeten dalam bidang pengelolaan aset. Untuk mendapatkan pegawai yang berkompeten maka diperlukan adanya suatu standar kerja yang perlu disusun dan terstandarisasi sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan pengembangan SDM, yaitu pegawai yang memiliki pengetahuan tentang aset dan pegawai yang mempunyai sikap terhadap pengelolaan aset. melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi terkait pengelolaan aset tetap. Pelatihan dapat membantu staf memahami praktik terbaik dalam pemeliharaan, penggunaan, dan pengelolaan aset pemerintah.
2. Untuk mengatasi kendala jaringan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), ada beberapa saran seperti :

- a. Pemantauan dan Pemeliharaan Rutin: Lakukan pemantauan secara rutin terhadap kinerja jaringan SIPKD. Pastikan bahwa semua perangkat dan sistem terhubung berfungsi dengan baik dan tidak ada perangkat yang mengalami gangguan atau kelebihan beban.
- b. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi: Pastikan bahwa staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan SIPKD memiliki pelatihan dan pengetahuan yang

cukup untuk menangani masalah teknis. Ini termasuk pemahaman tentang troubleshooting dan manajemen risiko dalam konteks jaringan.

- c. Kolaborasi dengan Penyedia Layanan: Jika perlu, berkolaborasi dengan penyedia layanan IT atau konsultan teknologi untuk mendapatkan bantuan dalam mengoptimalkan jaringan SIPKD dan meningkatkan kehandalan sistem secara keseluruhan.

